

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan korban luka-luka, dalam hal penyelesaian sanksi pidananya seringkali diproses tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melainkan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan itu sesuai dengan diskresi kepolisian yang rentan penyalahgunaan wewenang, maka disini penulis ingin mengkaji kasus lalu lintas yang sampai pada hukum acara pidana dan ingin menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Demak.

Penelitian hukum merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena permasalahan yang diteliti tidak dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas tidak sesuai dengan Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melainkan dengan yurisprudensi hakim yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali hukum yang berlaku dimasyarakat agar terjadi keseimbangan antara hukum dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas.

ABSTRACT

The enforcement of criminal sanctions to traffic carelessness defendant who causes death and injury to others, in its settlement, is often inappropriate with the law on Article 230 Act No. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation, but instead it is often settled through a mediation between both involved parties. The term is consistent with the police discretion which is vulnerable to authority abuse. Hence, the writer would like to analyze a traffic case which gets into the criminal procedural law and explain about the criminal sanctions enforcement of the judges to defendants in Pengadilan Negeri Demak.

Law research is one of the primary means in the development of science and technology which analyzes the applied provisions of law and what happens within the society. The legal materials needed in this research were obtained by using juridical sociology approach, because the case was examined not only from the perspective of the law or positive law alone, but also having regards to the sociological law aspects in social interaction and the implementation of law protection in the society.

In this research, the consideration of the judges in determining whether heavy or light the criminal sanction is to the defendant is not appropriate with Article 310 Section (2) and Section (4) Act No. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation, instead, it is determined through judges' jurisprudence which is regulated in Article 8 Section (2) Act No. 48 Year 2009 about Judicial Authorities. Judges shall inquire the local law applied within the society in order to balance both law and the societal values.

Keywords: Criminal Sanction, Carelessness, Traffic.